

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Soerjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Adang, Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)
- Aditya, Umi Rozah, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Amrini, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Arikunto, Suharsmi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- B.S, Regen, *Politik Hukum*, (Bandung: Utomo, 2006)
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Barnes, Bruce E., *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, (Maryland: University Press of America, 2007)
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Hakim, Lukman, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan RKUHP dan RKUHAP*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Hakim, Muh. Ridha, Budi Suharyanto, Lilik Mulyadi, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Harwanto, Edi Ribut, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Berdasarkan Filsafat Pancasila*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021)
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Irdan, Dahlan A. Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psitropika* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Liebman, Miriam, *Restoratif Justice: Hoe it Works*, (Jessica Kingsley Publisher, 2007)
- Mamudji, Sri, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- , *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998)
- Mudzakkir, et.al, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010)
- , *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, 2008)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muliadi, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)

- Rahayu, Devi, Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Rinaldi, Kasmanto, Ilham Prayoga, *Restoratif Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan*, (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023)
- Rosadi, Oton, *Studi Politik Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan Pertama, 2012)
- Sasongko, Hari, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996)
- Shafira, Maya, *et.al, Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*, (Lampung: Pustaka Media, 2022)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Sugiarto, Dwi, *et.al, Rencana Peraturan Pemerintah Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Litera)
- Supeno, Hadi, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006)
- Syukur, Fatahilah A, D.S. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Tahir, Hadari Djewani, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Thohari, A. Ahsin, Imam Syaukani *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas, Cetakan Kesembilan, 1996)
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justices*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)
- , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Wicaksana, Dio Ashar, *et.al, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
- Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999)

B. Jurnal, Makalah dan Tesis

- Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2022)
- Antonius Liem, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Perbankan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020", (Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Universitas Gadjah Mada, 2022).
- Aulia Pradipta, "Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", (Tesis Program Studi Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, 2022)
- Bambang Hariyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", (Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2009)
- Brilian Capera, "Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", (Tesis Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022)
- Handono, Adhi Prasetya, 2022, "Restorative Justice pada Kejaksaan RI sebagai Wujud dari Tujuan Bela Negara," *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 2, No. 1, (Februara 2022)
- Iwan Kurniawan, *et.al*, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2022)
- M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, (2014)
- Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2012)
- Melisa, *et.al*, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No.1, (2017)
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, (April 2022)

- Mujiburrahman, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUHPidana”, *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 4 No. 2, (2023)
- Muladi, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Makalah disampaikan dalam seminar IKAHI* (tanggal 25 April 2012)
- Otong Rosadi dan Aswad Satria, “Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana”, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 1, (September 2022)
- Padmo Wahyono, ”Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”, *Majalah Forum Keadilan*, April 1991
- Ridwan, “Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Enginnering”, *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 1, (Maret, 2016)
- Septa Chandra, ”Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2 (April-Juni 2014)
- Sihombing, Dedy Chandra, *et.al*, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No 2, (Juni 2023)
- Sophie Khanda Aulia Brahmana, ”Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Keadilaan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020”, (Tesis Program Studi Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, 2021)
- ST Burhanuddin, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto (2021)
- Syarif Hidayatullah, *et.al*, “Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasrkan Keadilan Restoratif”, *Dinamika*, Vol. 29, No. 2, (Juli 2023)
- Taza Salih Mauludin, *et.al*, “Pentimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoraatif Terhadap Perkara Yang Memiliki Kriteria/Keaadaan Yang Bersifat Kasuistik”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.7, (Juli 2024)
- Yeriza Adhytia, ”Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana atas Dasar Keadilan Restoratif sebagai Implementasi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020”,
(Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6755).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/P500/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan
Keadilan Restoratif di Peradilan Umum

D. Internet

Aditya Mardiasuti, ”Menkum HAM; Rutan Overkapasitas, Makan Napi Rp
1 T perBulan”, detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3184879/menkum-ham-rutan-overkapasitas-biaya-makan-napi-rp-1-t-per-bulan> (diakses pada 28 Januari 2024).

Aryo Mahendro, ”Perjalanan Kasus Sukena Pelihara Landak Jawa Hingga
Divonis Bebas”, detik.com. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7548684/perjalanan-kasus-sukena-pelihara-landak-jawa-hingga-divonis-bebas> (diakses 21 September 2024).

I Wayan Sui Suadyana, ”Kejati Bali Ungkap Alasan Tak Setop Kasus Warga
Pelihara Landak Dilindungi”, detikbali.com.
<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7531184/kajati-bali-ungkap-alasan-tak-setop-kasus-warga-pelihara-landak-dilindungi>
(diakses 21 September 2024).

Profile Instagram KejaksaanRI, ”Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana
Umum”,instagram.com,<https://www.instagram.com/p/C1dl8WrpIXO/?igsh=dmhkaWx1MzZncDY3>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2024)

Persatuan Jaksa Indonesia, ”Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H.,
M.M., M.H. resmi menyandang gelar Profesor dari Universitas Jenderal
Soedirman”, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1800.>,
(diakses 18 Juli 2024).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt
perihal perkara Minah, 19 November 2009.